

**ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM USAHA E-WARONG DI TARUTUNG  
KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Sari Mutiara Aritonang**

**18210003**

**Mahasiswa Prodi Adm. Bisnis Fisipol UHN Medan**

**ABSTRACT**

*Poverty in Tarutung sub-district, North Tapanuli Regency is the background of this research. In addition, it was also found in several sample areas such as in Hutatoruan I Village and in Hutagalung Siauluompu Village that the E-Warong business program did not run as expected. The purpose of the study was to obtain data/information related to the analysis of the implementation of the E-Warong business program in Tarutung District. In addition, for analyze the factors that cause the emergence of various obstacles in implementation of the E-Warong program. Attempt to answer problems and research objectives are carried out using theory policy implementation as one of the theoretical variants in the study of public policy. This study uses a qualitative method with descriptive analysis approach. The sample is selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Based on the research results, it can be concluded that the analysis of the implementation of the E-Warong program in Tarutung District has not run optimally, is considered not effective and not on target. Therefore, efforts are still needed to improve the quality of the implementation of the E-Warong program in Tarutung District. Recommended the Tarutung District Government needs to optimize socialization and guidance for KPM E-Warong social assistants regarding the functions and objectives of the E-Warong program. The government also needs to immediately resolve the problem of duplicate data and inaccurate data, as well as strict regulations and sanctions for perpetrators of abuse of authority both in data collection for the poor and in the distribution of social assistance.*

**Keywords: Analysis, Implementation, E-Warong Poverty**

**PENDAHULUAN**

Undang-undang dasar 1945 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan disaat ketidakmampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minum, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan kemiskinan merupakan masalah global.

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang meningkat 1,13

juta orang di bulan Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 7,88% pada September 2020 (dalam <https://www.bps.go.id>). Sumatera Utara yang berada di peringkat keempat dalam daftar

Namun di Indonesia saat ini pada kenyataannya kemiskinan dan kerentangan pangan masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai atau disebabkan karena sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat berusaha. Sehubungan dengan masalah ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan bantuan sosial (Bansos). Bantuan sosial yang dimaksud adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah Usaha E-Warong. Pengaplikasian usaha E-warong terlebih dahulu dilaksanakan oleh agen yang telah ditentukan pihak Koordinator Kementerian Sosial sebagai sarana penyaluran Bahan Pangan Non Tunai.

Untuk memberikan pengetahuan tentang Program Usaha E-warong kepada masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Tarutung kabupaten Tapanuli Utara maka dilakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan di wilayah kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah dalam bentuk langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan penyebaran arus informasi yang dilakukan secara langsung dengan cara melakukan bimbingan teknis melalui tatap muka kepada khalayak melalui

lingkungan baik secara musyawarah desa, kelompok ataupun lingkungan kerja.

Sosialisasi langsung yang dilakukan seperti pertemuan rapat koordinasi, seminar, diskusi dan video. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung adalah penyebaran informasi melalui perantara seperti media penggunaan elektronik atau media massa. Sosialisasi tidak langsung yang dilakukan seperti penggunaan media cetak (leaflet) dan media massa (whatsapp). Dengan sosialisasi yang telah memberikan pemahaman dan membuat E-warong dapat mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia terutama di kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Program Pelaksanaan Usaha E-Warong Di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjelaskan bahwa Pengertian analisis adalah sebagai berikut : Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

Analisi adalah penjabaran (pembentangan) suatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian.

Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (untuk kehidupan). Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya.

### **Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan dalam artian luas dipandang sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai sistem, organisasi prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi lain yang

merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran dan sebagai hasil (Winarno, 2002:101)

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

1. Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003:17) terdapat tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi yaitu:
2. Penafsiran: yaitu kegiatan yang menerjemakan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
3. Organisasi: yaitu unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
4. Penerapan: yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lainnya.
5. Dari beberapa definisi implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan.

### **Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Dalam mengkaji suatu proses kebijakan yang sedang berjalan (implementasi) dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan seperti yang telah dijelaskan pada model-model implementasi kebijakan diatas. Sehingga pelaksana

suatu kebijakan dapat dilihat melalui variabel-variabel yang ada dalam model pendekatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kebijakan dari Van Meter dan Van Horn untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan usaha program E-Warong pada Dinas Sosial Tarutung Kecamatan Tapanuli Utara.

Dengan demikian untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan penerapan pelaksanaan program tersebut maka dapat dilihat dari variabel-variabel berikut ini:

1. Sasaran Kebijakan (ukuran dan tujuan kebijakan)  
Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dipakai oleh para pelaksana kebijakan. Dengan adanya ketegasan standar dan sasaran kebijakan, maka implementor akan lebih muda menentukan dan membuat strategi untuk mengarahkan bawahan dan mengoptimalkan fasilitas yang dibutuhkan.
2. Sumber Daya (sumber-sumber kebijakan)  
Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan sangat penting dalam menjalankan kebijakan atau program.
3. Komunikasi (komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan)  
Komunikasi diperlukan agar terciptanya konsistensi. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar intitusi yang berkaitan dengan kebijakan program

### **Karakteristik Agen Pelaksanaan (badan-badan pelaksana)**

Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik tersebut. Hal ini dapat terlihat dari dukungan yang diberikan oleh organisasi formal maupun organisasi informal, yang termasuk didalam struktur organisasi dan program usaha E-Warong maupun yang berada diluar struktur organisasi program usaha E-Warong.

### **Kondisi Sosial dan Ekonomi.**

Kondisi sosial ekonomi merupakan kondisi dalam ranah implementasi yang dapat memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

#### **Disposisi (sikap para pelaksana)**

Sikap para impementor dibutuhkan dalam menjelaskan sebuah kebijakan atau program.

### **Program**

Menurut Cahrlles O. Jones, “ A programme is collection of interrelateddd project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan, telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan. (Jones, 1996:295)

### **Kemiskinan**

Suatu kondisi sosial yang bisa dikategorikan sebagai suatu masalah sosial adalah ketika suatu kondisi tidak sesuai dengan harapan, nilai, norma dan standar sosial yang telah disepakati oleh masyarakat. Salah satu kondisi sosial yang

tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat dan tidak sesuai dengan standar sosial masyarakat yaitu kemiskinan. Definisi kemiskinan dikemukakan oleh Qardhawi (2005:21) yaitu: Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan /individu masyarakat yang juga mengimplikasi akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi dan kebutuhannya.

#### **Karakteristik Miskin**

Prayitno dan Lincoln mengemukakan adanya karakteristik miskin yaitu sebagai berikut:

Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. Walaupun memiliki, tapi pada umumnya tidak mencukupi menjadi sangat terbatas. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri.

Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, waktu mereka umumnya habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar.

Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja diluar sektor pertanian.

#### **Program Usaha E-Warong**

Program Usaha E-Warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Elektronik Warung

Gotong royong (E-Warong). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih sejahtera. Dengan E-Warong, diharapkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif akan meningkat. Selain itu juga menghilangkan penyalahgunaan bantuan, sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Program ini juga diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengentasan kemiskinan dan bisa memangkas praktik rentenir. Tidak hanya itu saja, E-Warong juga akan membuat penerima Bantuan Sosial (Bansos) menerima sesuai dengan jumlahnya, tepat waktu, dan tepat sasaran. Proses penyaluran dilakukan melalui Agen Bank Mandiri, Pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM. Contohnya E-Warong KUBE, Agen Bank, Rumah Pangan Kita (RPK), dll. Penerima bantuan pangan dari E-Warong harus terdaftar terlebih dahulu di aplikasi SIKS-NG yang di data melalui kepala desa/Lurah setempat melalui musyawarah desa dengan Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Total pendapatan mencapai Rp.35 juta yang akan dibagi dengan 10 anggota KUBE dan satu pendamping. E-Warong nantinya juga akan diintegrasikan untuk penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan

defenisi Konsep dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

Program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan, telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut secara keseluruhan.

E-Warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Elektronik Warung Gotong royong (E-Warong). Pelaksanaan usaha E-Warong dilapangan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pelaksanaan Program Usaha E-Warong melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tarutung melalui Koordinator Program Kota Tarutung. Penyaluran bantuan bahan pangan melalui Bank penyalur kepada Agen E-Warong yang kemudian ditujukan kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Sasaran dari Program Usaha E-warong ini adalah kepada seluruh masyarakat miskin terutama penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendetakaan kualitatif yang cenderung mengasah kemampuan menganalisa, pengalaman dan kepekaan terhadap

pengumpulan informasi dan wawancara sesuai realita yang ada. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejaidan-kejadian secara akurat dan sistematif mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu (Zuriah, 2006: 47). Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan keterkaitan dan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis.

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel/informan yang akan digunakan oleh peneliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Informan Kunci, (2) Informan Utam, dan (3) Informan Tambahan. Adapun analisis setelah data terkumpul dilakukan terkait dengan perumusan masalah penelitian itu, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriktif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Data di Lapangan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan usaha E-Warong di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara apakah berjalan sesuai baik dan apakah sudah membantu mengembangkan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong. Fokus penelitian ini mengenai pelaksanaan usaha E-Warong di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

wawancara dengan informan yang telah ditentukan yaitu: Koordinator Dinas Sosial Tarutung (1 orang), Agen E-Warong (5 orang) dan masyarakat desa (2 orang). Adapun wawancara yang diajukan peneliti yaitu berkaitan dengan penentuan prioritas pengembangan usaha masyarakat, kesenjangan harga bahan pangan pokok, dan bantuan sosial yang tepat sasaran

### **Pembahasan**

Analisis Implementasi Program Pelaksanaan Usaha E-Warong di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara hal ini didasari oleh Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT). Program E-warong sudah berjalan dengan baik terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dimana KPM merasa terbantu dengan adanya program ini namun tidak semua pelaksanaan dapat berjalan dengan sempurna dimana dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan masalah yang sering dijumpai pada pelaksanaan program E-Warong yaitu akurasi data yang berkaitan dengan bantuan tidak semua masyarakat miskin yang terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdaftar sebagai masyarakat penerima bantuan E-Warong, masih terdapatnya saldo dari KPM yang kosong, tidak lancar keluar dalam setiap bulannya dan sembako yang disalurkan masih belum sepenuhnya baik. Tetapi walaupun demikian penyaluran di Kecamatan Tarutung sudah mulai membaik, hal ini bisa berdasarkan realita dilapangan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Maka rumusan

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan program usaha E-Warong di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan secara purposive sampling. Teknik analisis data yaitu dengan cara data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio dan visual untuk memperkuat data. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, di Desa Hutatoruan I, Desa Hutagalung Sialuompu Kecamatan Tarutung. Hasil penelitian mengungkapkan Analisis Implementasi pelaksanaan program Usaha E-Warong di Kecamatan Tarutung hampir berjalan dengan baik namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dihadapi oleh agen adalah saldo kosong dan bahan pangan yang tidak bagus hasilnya, terlihat dari keluhan masyarakat penerima bantuan E-Warong yang mengeluh sembako seperti buah dan sayur yang tidak segar lagi, namun hal ini terjadi dikarenakan penyaluran yang dilakukan sudah sore hari padahal sembako datang dipagi hari. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program usaha E-Warong ditujukan melalui adanya keluarga yang terkadang tidak tepat sasaran menjadi KPM dari Program BPNT, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan juga sering terlambat, serta administrasi yang belum siap secara infrastruktur menyebabkan proses yang

menjadi tidak tertata dan cenderung masih belum siap. Namun secara jumlah bantuan yang disalurkan sudah sesuai dengan amanat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program BPNT dan kualitas bahan pokok yang disediakan, seperti beras dan telur juga baik dan layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Koordinator Daerah di Dinas Sosial Tarutung, di Desa Hutatoruan I dan Desa Siaoluompu program pelaksanaan Usaha E-Warong Sudah berjalan dengan baik dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah merasa terbantu dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori model Mirelee S.Grindle dengan model George C. Edward dimana dijelaskan tentang sasaran kebijakan yang di gunakan harus sesuai dan tepat sasaran, komunikasi yang dijalin antar pelaku penyalur harus baik adanya agar tercipta sebuah keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Soekanto, dan teori tujuan dari pemberdayaan oleh Mardikanto untuk melihat hasil dari Kemandirian Ekonomi yang dikemukakan oleh Sumudiningrat. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kemandirian yang dimana masyarakat miskin mampu, lebih kreatif, dan produktif dalam menghidupi perekonomian keluarga penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 sangat berdampak positif pada pemerintah dalam upaya kesejahteraan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

di Kota/kabupaten. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Wilayah Kota/Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Sosial membuat warga miskin menjadi sejahtera. Pendirian E-warong (Elektronik warung gotong royong) dianggap mampu menjadi sentra ekonomi dan kesejahteraan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka tidak hanya sejahtera di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan pangan akan tetapi sejahtera dalam hal kemandirian, pola berpikir, psikologis dan kesehatan. Program yang dilakukan E-warong (elektronik warung gotong royong) mempunyai konsep yang hampir sama seperti pembangunan E-warong (elektronik warung gotong royong) yang memberdayakan warga miskin dan membuat perekonomian menjadi mandiri dan sejahtera, yaitu Program Suplay pedagang kecil, Program Senam Sehat Ceria dan Program Ekonomi Kreatif.

Program-program yang diciptakan dan dilaksanakan E-warong (elektronik warung gotong royong) di Kota/Kabupaten sebaiknya bisa berkesinambungan dan membuat kemajuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) generasi selanjutnya agar tujuan untuk memutus rantai kemiskinan bisa dilakukan dengan terciptanya program-program baru yang lebih bagus dan lebih menyejahterakan keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program yang dilaksanakan juga memperhatikan kapasitas tempat E-warong (elektronik warung gotong royong) yang relative kecil yang menempati sebagian ruang dalam rumah salah satu anggota Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga untuk gudang suplay bahan pangan harus



diperhatikan kecepatan dalam pendistribusiannya karena keberadaan dan esistensi E-warong (elektronik warung gotong royong) sangat diminati oleh warga miskin keluarga penerima manfaat (KPM).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Usaha E-Warong Kecamatan Tarutung mengacu pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sehingga pelaksanaannya tidak akan lari dari peraturan tersebut. Sasaran kebijakan dalam Analisis Implementasi Program Pelaksanaan Usaha E-Warong pada Dinas Sosial Tarutung sudah optimal. Dalam hal ini program E-Warong Kecamatan Tarutung khususnya Desa Hutatoruan I dan Desa Hutagalung Sialoumpu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Khususnya berkaitan dengan kepemilikan rumah yang berada dekat dengan masyarakat. Kriteria lain yang terpenuhi yakni agen E-Warong telah melaksanakan transaksi bantuan sosial non tunai. Masyarakat sudah mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada E-Warong. Program E-Warong juga membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yakni masyarakat diberdayakan dalam kegiatan pengelolaan E-Warong.

Komunikasi yang dilakukan antar badan-badan pelaksana dilakukan dengan rapat koordinasi yang dilakukan minimal 1 bulan sekali. Rapat koordinasi tersebut

membahas mengenai penerapan program E-Warong Tarutung seperti masalah-masalah maupun kendala yang terjadi dilapangan terkait program E-Warong. Komunikasi dengan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi. Maka dalam pelaksanaannya komunikasi yang dilakukan oleh setiap badan pelaksana program dengan menjalankan turpoksinya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Karakteristik agen, pelaksana program E-Warong Tarutung melakukan kerjasama oleh setiap personil anggota Pelaksanaan program E-Warong yang bertujuan mensukseskan program. Adanya keterbukaan informasi dalam kegiatan pendistribusian manfaat untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun untuk komitmen pelaksana dinilai belum optimal karena adanya dana anggaran dari pemerintah daerah menghambat pendamping sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendataan calon KPM.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dari penerima manfaat program E-Warong untuk kepala rumah tangga sebagian bekerja sebagai buruh, Petani dan tukang kusuk. Untuk kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program E-Warong adalah orang miskin yang dipilih berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

Disposisi program E-Warong Tarutung dalam hal ini pelaksana kebijakan ini sudah menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana program E-Warong untuk terus memperbaiki program yang dibuat

pemerintah menjadi lebih baik. Disposisi menunjukkan bahwa adanya komitmen dari pelaksana untuk menjalankan program E-Warong seperti pendamping sosial (agen) sebagai pelaksana kebijakan terus aktif dalam memberikan informasi terkait pertemuan, pengarahan, kepada KPM tentang jadwal penyaluran bantuan jika sudah masuk. Koordinator Daerah Dinas sosial kerap datang ke lokasi penyaluran E-Warong setiap bulannya untuk motivasi-motivasi positif kepada KPM. Membantu KPM jika bermasalah dengan memberikan solusi-solusi. Namun untuk dukungan serta komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Pelaksanaan program E-Warong tersebut belum optimal terlihat dari sikap pemerintah daerah Tapanuli Utara yang tidak memberikan anggaran dana pemerintah daerah bagi para implementor dalam mensukseskan program.

#### **Saran**

Berdasarkan pada berbagai temuan dilapangan serta kesimpulan penelitian ini, maka beberapa saran yang bisa peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan fasilitas E-Warong Kecamatan Tarutung yang sudah disediakan oleh pemerintah.
2. Untuk agen E-Warong Kecamatan Tarutung diharapkan untuk lebih memantau kinerja agar pelayanan yang diterima masyarakat bisa tersalur dengan baik dan tepat sasaran, berupaya memberikan fasilitas yang lebih baik dan mudah, menjalin hubungan yang baik dengan

masyarakat saat berinteraksi, meningkatkan publikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan program usaha E-Warong.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Sosial RI.(2012). Pedoman Umum PKH (Program Keluarga Harapan). Penerbit, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial: Jakarta, 2012

Sekretaris Direktorat Jenderal PFM (2017) Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai. Penerbit Kementerian sosial RI: Jakarta pusat

Irwan Susanto (2020). Pedoman Umum Program Sembako 2020. Penerbit Kementerian Sosial RI: Jakarta pusat

Jones (2003) Implementasi Kebijakan 2003. Terbit di Jakarta

Mirelee S. Grindle (2003). Implementasi Kebijakan Publik yang Berpola Paksa dan Pola Pasar. Penerbit Nugroho 2003: Jakarta Pusat

George C. Edward III (2003). Model-model Kebijakan Publik. Terbit di Jakarta